

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan variabel penelitian dari hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Teori *Fiscal Federalism* atau Federalisme fiskal adalah studi hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah dimana sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Berawal dari sebuah prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk semua negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal. Konsep dari federalisme fiskal adalah pemerintah tingkat II (Kabupaten/Kota) adalah perwakilan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat atau dapat diartikan pada kebanyakan negara yang berbentuk federal dimana tidak menjadikan pemerintahan negara sebagai bagian dari pelaku otonom (Prasetyia, 2013).

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan

tersebut. Jumlah bidang pemerintahan yang menjadi tanggungjawab birokrasi adalah sama di antara level pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, namun keberhasilan masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai dengan kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah, dan kondisi setiap daerah (Badrudin, 2012).

Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi di negara Indonesia diharapkan mampu membangun daerah menjadi lebih baik dengan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam segala bidang agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga masyarakat sejahtera. Teori Federalisme Fiskal (Teori *fiscal federalism*) adalah teori yang berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan situasi ekonomi, berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakatnya (Sari & Supadmi, 2016).

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

2.1.2.1 Pengertian Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8 :

“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 :

“Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Terdapat beberapa pengertian Desentralisasi Fiskal menurut para ahli, adalah sebagai berikut :

“Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis” (Zaufi, Taufik, & Agusti, 2016).

“Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dan otoritas Negara kepada Daerah otonom. Kewenangan fiskal meliputi kewenangan (1) mengelola pendapatan/perpajakan, (2) keleluasaan untuk menentukan anggaran, dan (3) mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk membiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah” (Simandjuntak, et al., 2022)

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi, lebih efektif dan efisien, lebih inovatif dan lebih produktif. (Muhammad, 2014)

“Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan” (Sasana, 2006).

Berdasarkan beberapa definisi teori di atas mengenai desentralisasi fiskal dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang

dilimpahkan (UU No.23 Th 2014; UU No.33 Th 2004; Sasana, 2006; Simandjuntak, et al., 2022; Muhammad, 2014).

2.1.2.2 Tujuan Desentralisasi Fiskal

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*), meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah sebagai penyokong perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sehat dan berkelanjutan. Kondisi tersebut antara lain dapat dicapai dengan *human capital development* dan *economic inclusiveness*. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bahu membahu dalam melaksanakan *human capital development* antara lain dengan memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang berdampak langsung pada kualitas manusia Indonesia (Mardiasmo, 2018).

Selain itu, tujuan desentralisasi fiskal adalah membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah, memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, mobilisasi pendapatan daerah dan nasional, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Di samping itu, desentralisasi fiskal juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah daerah, memastikan pelaksanaan layanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi

pemerintah, dan memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia (Megantara & Abimanyu, 2009).

2.1.2.3 Jenis Desentralisasi Fiskal

Ada dua jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonom) dan batas pengaturannya adalah daerah; sedang desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturannya adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal pendidikan dan kebudayaan, pertanahan, kesehatan, dan lain-lain.

Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu untuk mengambil keputusan. Tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal (Muhammad, 2014).

2.1.2.4 Pengukuran Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal yang dihitung dengan menggunakan Model derajat desentralisasi fiskal (DDF) sebagai berikut:

$$DDF = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2019).

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, Dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya :

“Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Adapun beberapa pengertian Belanja Modal menurut para ahli, adalah sebagai berikut :

“Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP) Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama

antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya” (Zaufi, Taufik, & Agusti, 2016).

“Belanja modal memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan sarana prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik. Tepatnya pengalokasian belanja modal seperti pembenahan infrastruktur daerah serta fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia” (Dewi & Supadmi, 2016).

“Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan” (Wahyuningsih & Widaryanti, 2015).

“Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubeler, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/perpustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman serta persenjataan/keamanan” (BPS, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi teori di atas mengenai belanja modal dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, khususnya dalam hal peningkatan sarana prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik (PMK

No.231 Th 2020; Zaufi, Taufik, & Agusti, 2016; Dewi & Supadmi, 2016; Wahyuningsih & Widaryanti, 2015; BPS, 2021).

2.1.3.2 Jenis Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung/ bangunan, peralatan dan asset tidak berwujud Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Belanja modal dikategorikan menjadi lima kategori antara lain yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk memperoleh/membeli/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, penimbunan kembali, perataan tanah, penyiapan tanah, sertifikasi, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai peralatan dan mesin tersebut dalam kondisi siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk menyediakan/ menambah/ mengganti/ peningkatan pembangunan/pemeliharaan, dan termasuk biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/menambah/mengganti/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.4.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan manusia, diperlukan suatu instrumen pengukuran. Instrumen tersebut dikenal dengan nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penghitungan IPM melibatkan tiga unsur utama dalam kehidupan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM dapat menerangkan keadaan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan berupa akses layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan untuk hidup layak pada suatu wilayah atau negara. Pada tahun 1990, IPM untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (1990) dan dilaporkan setiap tahunnya (Nashshar, 2022).

Beberapa pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut para ahli, adalah sebagai berikut :

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah alat untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat pengetahuan, dan kehidupan yang layak” (Iba & Zainuddin, 2016).

“Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index(HDI) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian tiga hal mendasar pembangunan manusia yaitu (1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan (3) tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan” (Mirza, 2012).

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran keberhasilan pembangunan manusia di wilayah tertentu yang dinyatakan dalam angka indeks” (Nashshar, 2022).

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan pengukuran dari perbandingan harapan hidup, pendidikan serta standar hidup untuk setiap negara seluruh dunia. Pengklasifikasian HDI digunakan untuk mengetahui apakah sebuah negara dapat dikategorikan negara maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang serta kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup akan mudah diukur. Apabila kebutuhan akan pelayanan dan ketersediaan kebutuhan publik dapat terpenuhi maka masyarakat akan merasa diperhatikan dan nyaman hingga mampu menjalankan setiap kegiatan dengan efisien” (Adipura, Rahayu, & Junaidi, 2022).

Berdasarkan beberapa definisi teori di atas mengenai indeks pembangunan manusia dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia adalah pengukuran/alat untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Komponen dasar dalam perhitungan IPM tersebut ada 3, yaitu usia yang panjang dan kehidupan yang sehat (Kesehatan), ilmu pengetahuan (Pendidikan), dan standar kehidupan yang layak (Pengeluaran) (Iba & Zainuddin, 2016; Mirza, 2012; Nashshar, 2022; Adipura, Rahayu, & Junaidi, 2022).

2.1.4.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting untuk melihat pembangunan dari sisi manusia. Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Secara kontekstual, perkembangan IPM menunjukkan perubahan pilihan-pilihan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bernilai (BPS, 2021).

2.1.4.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Menurut Badan Pusat Statistik setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia, sebagai berikut: (BPS, 2021)

1. Umur Harapan Hidup saat Lahir (Dimensi Kesehatan)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation). Data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) yang bersumber dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Adapun dimensi kesehatan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (Dimensi Pendidikan)

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang

digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses penghitungan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pengetahuan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Indeks HLS dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Salah satu variabel yang lainnya yaitu, Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dua variabel yang terdapat pada dimensi pendidikan tersebut maka Indeks pendidikan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

3. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (Dimensi Pengeluaran)

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity) berbasis formula Rao. Adapun dimensi pengeluaran dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Dari ketiga indeks dimensi tersebut, maka dapat dihitung rata-rata geometriknya untuk menghitung nilai IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{pengetahuan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun peneliti-peneliti terdahulu dapat diringkas dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	I Made Aditya Pramarta & A.A.N.B. Dwirandra (2018)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal dan Investasi Swasta Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
2	Denni Sulistio Mirza (2012)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009	Variabel Independen: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
3	Muhammad Yafiz Zaufi, Taufeni Taufik Dan Restu Agusti (2016)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Dependen: Belanja Modal dan Indeks	1. Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap IPM 2. Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap IPM Belanja Modal dalam memediasi Desentralisasi Fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap IPM.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		12 Kabupaten/Kota SeProvinsi Riau	Pembangunan Manusia	
4	Moch. Rudy Setyawan & Sjamsul Arief (2019)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 - 2017)	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	1. Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 9 Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017. 2. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 9 Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017.
5	Neng Kamarni, Chris Yohanes Ginting, Maulini Septya (2022)	Dampak Dana Otonomi Khusus Dan Dana Perimbangan Terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017	Variabel Independen: Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Untuk Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
6	I G A Agung Astia Dewi, Ni Luh Supadmi (2016)	Pengaruh Alokasi Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Belanja Rutin dan Belanja Modal Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
7	Satmaka Srasa	Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap	Variabel Independen:	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Saswatata (2022)	Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang	PAD, DAU, dan DAK Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia	signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan.
8	Febita Agustin Nurhalimah, Ignatia Martha Hendrati, Kiki Asmara (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal di Kota Surabaya	Variabel Independen: PAD dan Dana Perimbangan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal	1. Pendapatan asli daerah melalui belanja modal tidak memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya tahun 2010–2019 2. Dana perimbangan melalui belanja modal tidak memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya tahun 2010–2019.
9	Anggatia Ariza (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Islam	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Dalam Prespektif Islam	Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Anggaran belanja modal sebaiknya diperuntukkan untuk bidang-bidang yang penting bagi masyarakat seperti bidang pendidikan dan kesehatan serta untuk penciptaan lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
10	Mahirsyah Pradana (2015)	Alokasi Belanja Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia	Variabel Independen: Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga Variabel Dependen:	Alokasi belanja modal berefek negatif dan signifikanatas IPM.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Indeks Pembangunan Manusia	
11	Bahrul Ulum Rusydi, Citra Nurul Maulia, Hasbiullah (2022)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal (PAD, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil) Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan, dan Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan.
12	Zainuddin Iba (2016)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM Di Provinsi Aceh	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi aceh tahun 2010-2015.
13	Muhammad Imam Nashshar (2022)	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK) Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Mediasi : Belanja Modal	DAK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal. Namun, DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Di sisi lain, belanja modal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPM. DAK melalui belanja modal mempunyai pengaruh tidak langsung secara positif dan signifikan terhadap IPM.
14	Willman Fogati Zebua & Noval	Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja	Variabel Independen:	Alokasi Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Adib, Ph.D., Ak., CA. (2013)	Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studipadakabupatendan Kota Di Wilayahprovinsi jawa Barat Tahun 2011-2013)	Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	
15	Rahmi Handayani, Ahmad Soleh, Agus Santoso, Yunie Rahayu (2022)	Analisis Kausalitas Belanja Modal, Bantuan Sosial dan Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Belanja Modal mempengaruhi IPM.
16	Nguyen Thanh Hung & Su Dinh Thanh (2022)	<i>Fiscal Decentralization , Economic Growth, And Human Development: Empirical Evidence</i>	Variabel: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pembangunan Manusia	Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi secara statistik negatif, namun efeknya positif dalam hal pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bukti statistik dari sampel penelitian pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan efisiensi desentralisasi fiskal, tetapi memang dapat menurunkan indeks pembangunan manusia.
17	Rudy Badrudin & Claudia Astika Putri	<i>The Evaluation of Fiscal Decentralization Implementation</i>	Variabel: Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap permodalan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Mayangsari (2023)			<p>pengeluaran, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial; Belanja modal memiliki negatif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh positif signifikan terhadap sosial kesejahteraan; dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
18	Joko Tri Haryanto (2018)	<i>Fiscal Condition of Sumatra in Decentralization Era</i>	Variabel: Desentralisasi Fiskal	<p>20 daerah berada pada Kuadran I atau sekitar 12,2% dari total wilayah yang dianalisis. Sekitar 54 daerah di Kuadran II atau sekitar 32,93% dari total wilayah. Daerah ini memiliki rendah mandiri tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif prospek. Daerah yang termasuk kuadran III adalah sekitar 35 daerah atau 21,34% dari seluruh lokus daerah pengamatan. Daerah-daerah yang termasuk dalam kuadran III dianggap tidak ideal meskipun porsinya tinggi, dengan demikian</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>kemerdekaan daerah berhasil, namun prospek ekonomi ke depan negatif. Kondisi wilayah di Sumatera telah banyak daerah yang masih berada di Kuadran IV itu berarti kemandirian rendah dan prospek dari pertumbuhan ekonomi negatif.</p>
19	Nurul Fadillah & Lilies Setiartiti (2021)	<i>Analysis of Factors Affecting Human Development Index in Special Regional of Yogyakarta</i>	Variabel: Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. - Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. - Pengeluaran pemerintah kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
20	Choirur Rohmah, Suratno, Kuswanto, & Ervan Johan Wicaksana (2021)	<i>Factors Affecting Inter-Regional Human Development Index in Jambi Province</i>	Variabel: Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan analisis menggunakan data panel, faktor bidang kesehatan dengan angka harapan hidup memiliki dampak positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jambi untuk tahun periode 2010-2020. - Pada pendidikan faktor, hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan sekolah jangka

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				panjang dan rata-rata lama persekolahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi untuk periode 2010-2020. - Dalam bidang ekonomi, pengeluaran per kapita disesuaikan agar positif dan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi periode 2010-2020.

Sumber: Data diolah (2023)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Desentralisasi diharapkan menjadi penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin membaiknya tingkat desentralisasi diharapkan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena meningkatnya derajat desentralisasi fiskal dapat mencerminkan seberapa besar keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangan untuk pembangunan daerahnya masing-masing (Soleh & Ardila, 2018).

Pada Teori *Fiscal Federalism* menyatakan bahwa pembangunan manusia dapat dicapai dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah fungsinya untuk meningkatkan efisiensi sektor publik. Untuk melihat seberapa besar pembangunan manusia pada suatu wilayah adalah dengan cara menghitung rasio derajat desentralisasi.

Melalui rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Jika pelayanan publik dapat terpenuhi dengan baik diharapkan Indeks Pembangunan Manusia juga dapat meningkat (Setyawan & Arief, 2019).

Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian (Iba & Zainuddin, 2016) yang menyatakan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh tahun 2010-2015. Hal ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

2.2.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

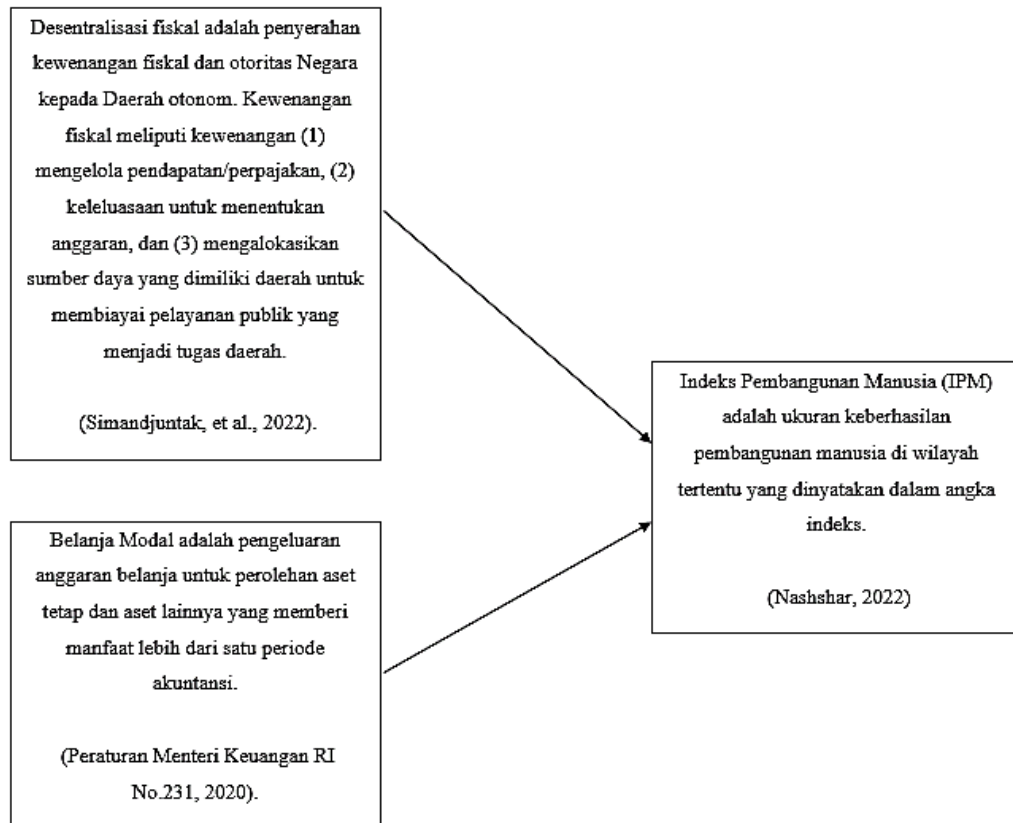
Belanja modal memiliki tujuan untuk memperoleh aset tetap berupa infrastruktur pelayanan publik. Belanja modal termasuk belanja pemerintah yang dialokasikan dan bertujuan untuk menjadikan kualitas hidup masyarakat di Indonesia menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya melalui upaya-upaya untuk memperbaiki pelayanan dasar baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengakses pendidikan, menyediakan fasilitas umum dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang mencakup seluruh masyarakat (Nashshar, 2022).

Oleh karena itu, belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan pemerintah, hal ini sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Sejalan dengan peningkatan pelayanan pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia.

Teori *Fiscal Federalism* menekankan bahwa alokasi belanja modal yang tepat seperti perbaikan infrastruktur daerah serta fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas, meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Dewi & Supadmi, 2016). Juga sejalan dengan (Faturani & Dona, 2023) yang menemukan bahwa alokasi Belanja Modal yang efektif memiliki dampak yang kuat kepada peningkatan kualitas pembangunan manusia yang dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia.

Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian (Zebua & Noval Adib, 2013) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Mirza, 2012) yang menyatakan adanya pengaruh positif yang signifikan belanja modal terhadap IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun kerangka pemikiran dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dibuat maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis untuk menguji pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sebagai berikut:

Hipotesis 1: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2018-2022.

Hipotesis 2: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2018-2022.